



# Memikirkan Kembali Community Policing untuk Polisi Indonesia

Oleh : Satjipto Rahardjo

Beberapa tahun terakhir ini **Community Policing (CP)** sudah semakin menjadi tren di kalangan Polri. Bahkan, kalau tidak salah, sejak hari-hari pertama menjabat Kapolri, Jenderal Sutanto juga mendorong dilakukannya tipe tersebut. Kita mengetahui, bahwa CP tersebut merupakan hasil reformasi perpolisian di Amerika Serikat antara tahun 1960-1990. Pada waktu itu Polisi Amerika Serikat mendapat kritik yang tajam, karena dianggap tidak efektif. Maka mulailah muncul tipe-tipe alternatif, seperti "*problem-oriented policing*", "*pre-emptive policing*" dan "*community-based policing*". Teori-teori alternatif juga bermunculan, seperti Teori "*Broken windows*" dari Wilson dan Kelling,

**"Kemunculan CP datang pada waktu yang tepat bagi Polri, yang tentunya sedang berusaha untuk menemukan arah baru perpolisian di negeri ini, sesudah keluar dari militer."**

Pada intinya CP menggeser paradigma kepolisian lama yang memperkuat kehadiran Polisi di masyarakat. Pekerjaan Polisi

menjadi lebih baik dengan menambah jumlah Polisi. Pikiran reformatif mengatakan, bahwa bukan dengan cara itu perpolisian dijalankan, melainkan dengan memperkuat partisipasi masyarakat. Bukan dengan cara "*more police*", tetapi "*less police*".

Apakah CP tidak baik untuk dijalankan di Indonesia? Pada hemat penulis, tipe tersebut setidaknya menggugah kita semua untuk merenungkan apakah yang dilakukan Polri selama ini sudah benar? ada faktor tambahan penting yang mendorong kita untuk memikirkan tipe perpolisian yang berbeda daripada masa lalu. Faktor tersebut adalah dikeluarkannya Polri dari ABRI. Pemisahan tersebut perlu dimaknai tidak hanya kuantitatif, melainkan lebih

kualitatif. Dengan demikian kemunculan CP datang pada waktu yang tepat bagi Polri, yang tentunya sedang berusaha untuk menemukan arah baru perpolisian di negeri ini, sesudah keluar dari militer. Di Indonesia muncul wacana tentang "**Polisi Sipil**" atau "*menjadi Polisi Sipil*" (Satjipto Rahardjo, "*Polisi Sipil dalam perubahan Sosial di Indonesia*", 2002.). Rupa-rupanya apa yang dipikirkan di Indonesia berkorespondensi dengan perubahan perpolisian di Amerika Serikat yang dicitrakan sebagai, "*moving away from military configurations and shaking hands with entire community*". Perpolisian alternatif di Amerika menjadi inspirasi bagi kalangan pemikiran kepolisian di Indonesia.

Pada masa kepemimpinan Kapolda Jateng, Muslihat (1986-1990), masih di masa Orde Baru, telah terjadi praktis dan pergerakan yang sangat menarik di wilayah tersebut. Memang kejadiannya tidak monumental, tetapi maknanya sungguh luar biasa. Tanpa sadar tanpa mengerti tentang CP, Polda Jateng telah memasuki ranah perpolisian alter-

natif, dengan cara menerapkan prinsip-prinsip CP. Perpolisian alternatif tersebut dijalankan di bawah panji-panji Babinkamtibdes (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Desa). Dengan mata kepala sendiri saya sempat menyaksikan sukses proyek tersebut.

Bangsa Indonesia mungkin boleh disebut sebagai nasion yang muda, tetapi sesungguhnya memiliki sejarah sosio-kultural yang sangat panjang. Dalam perjalanan sejarahnya sebelum formal menjadi bangsa Indonesia, bangsa ini telah dihadapkan kepada pertemuannya dengan Hindu, Islam dan terakhir kolonial Belanda. Sekalian pertemuan tersebut memperkaya kebudayaan sejumlah besar entitas etnis yang hidup dalam suatu kawasan, yang waktu itu bernama Hindia-Belanda. Yang ingin dikatakan disini adalah, bahwa pada waktu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia tidak mulai dari nol (*beginning from scratch*). Mereka adalah bangsa yang baru tetapi stok lama. Ini berarti, bahwa mereka sudah memiliki modal tradisi, nilai-nilai,

serta banyak institut sosial dan politik, pada waktu lahir formal sebagai bangsa Indonesia. Tidak sedikit ujaran-ujaran lama yang sekarang sudah diberi merek baru, seperti "menang tanpa ngalahake" (menjadi *win-win solution*), "*nglurung tanpa bala*" (menjadi "*occupation without troops*"). Jadi, bangsa Indonesia tidak kekurangan atau miskin kearifan lokal (*local wisdom*).

Pengalaman pada bangsa kita, mutatis mutandis, juga berlaku bagi polisi-polisi kita. Menurut penulis, Polisi Indonesia jangan merasa sebagai "anak-kemarin sore" yang masih ingusan. Saya kira itu hanya akan merendahkan diri kita sendiri, yang sebetulnya kaya dengan modal sosial dan kultural. Memang diakui, bahwa selama ini Barat mendominasi seluruh dunia, termasuk dunia Timur. Aliran konsep, pemikiran, hampir selalu mengalir dari Barat ke segala penjuru dunia, termasuk Asia Timur, dimana Indonesia berada. Sebut saja, "*rule of law*", demokrasi, birokrasi modern dan lain-lain, semua datang dari Barat. Aliran sepihak seperti itu akan

menimbulkan kesan yang sangat merugikan Timur, seolah-olah memang Timur sama sekali tidak memiliki apapun yang dapat disumbangkan ke dunia, padahal itu tidak benar sama sekali.

Latar belakang yang dipaparkan di atas ingin mengajak kita untuk berani melakukan pembangunan, termasuk pembangunan Polri, tidak dari luar, melainkan dari dalam (*development from within*). Ini tidak mengada-ada,



Polisi sebagai mitra masyarakat

karena seperti dikemukakan di atas, bangsa kita memang kaya dengan modal dan tradisi sosial. Pada hemat penulis pembangunan Polri akan lebih berhasil apabila berangkat dari modal sosial yang sudah kita miliki sendiri. Modal sosial ini dapat bertahan sebagai tradisi karena menunya memang cocok dengan habitat Indonesia. Ini tidak berarti bahwa kita lalu bersikap chauvinistis dan menolak semua yang datang dari luar Indonesia. Tidak! Apa yang dikemukakan di atas hanyalah memikirkan strategi pembangunan yang benar, khususnya pembangunan Polri. Kita

boleh menimbang-nimbang apa yang baik dari luar, tetapi pada akhirnya yang lebih menentukan adalah modal yang telah kita miliki. Dalam bahasa Belanda ada pepatah *"Men kan alleen roeien met de riem die men heft"*, kita hanya dapat mengayuh perahu dengan dayung yang kita miliki.

Konsep perpolisian yang diajukan disini, yaitu yang bertolak dari modal sosial Indonesia sendiri, sebetulnya bukan barang baru, karena, misalnya, Jepang sudah lama menjalankannya.

Jepang konon sukses dengan polisinya, bukan karena mengimpor pengetahuan Barat, tetapi karena berangkat dari modal sosial, nilai-nilai dan tradisi yang telah mereka miliki.

Kawaji Toshiyosi, Kepala Polisi Metropolitan Tokyo yang pertama dan disebut-sebut sebagai arsitek kepolisian Jepang modern, tidak ingin memiliki angkatan kepolisian sama seperti pendahulunya, yang menakut-nakuti rakyat dengan samurainya agar mereka tunduk. Oleh Toshiyosi, reformasi kepolisian 1870 dirumuskan dengan padat melalui kata-katanya, bahwa pemerintah hendaknya dilihat



Kepedulian salah satu tugas polisi terhadap masyarakat.

sebagai orang tua, rakyat sebagai anak-anaknya dan Polisi sebagai juru rawat anak-anak itu. Dengan peta tersebut hanya dapat dibangun berdasarkan modal sosial Jepang sendiri yang terkenal unik itu (baca, misalnya, L.Craig Parker, Jr, *The Japanese Police System Today, An American Perspective, 1984*).

Kepolisian Jepang mewarisi tradisi kekuasaan yang otoriter, yang didasarkan pada filsafat konfusianisme, dimana terdapat asumsi, bahwa *".....the state is a prior and self justifying entity, sufficient in it self. This result in the belief that political functions, and the existence, maintenance and development of the state should take precedence over the goals of other individuals an associations,....."* Dengan landasan filsafat seperti itu, maka kepolisian Jepang menjadi sangat kuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang dipandang asing oleh dunia modern. Dikatakan, bahwa *"There would be no household in Japan into which eyes of the police would not see and the ear would not hear"*. Tradisi yang demikian itu menjadi tulang punggung dari perpolisian di Jepang. Sudah barang tentu,

dunia boleh suka atau tidak suka dengan kultur Jepang seperti itu, tetapi yang ingin dikatakan disini, bahwa Jepang memberikan ilham yang baik bagi kita, bagaimana suatu bangsa mendasarkan pembangunan institutnya atas dasar modal sosial yang mereka miliki. Masih banyak prestasi polisi Jepang yang hanya dapat dimengerti dan dijelaskan dari sudut keunikan bangsa itu, seperti hidup harmonis, menghindari konflik dan masih banyak lagi.

Bukan hanya Jepang yang unik, tetapi sesungguhnya semua bangsa di dunia, dalam kadar berbeda-beda, memiliki keunikannya sendiri pula. Bahkan

diantara Negara-negara Barat sendiri seperti perpolisian di Amerika Serikat dan Inggris, juga berbeda. Indonesia memiliki tradisi dan sejarah kultur yang sangat panjang. Kita juga tidak miskin kearifan. Sekian banyak lingkungan etnis Indonesia pasti memiliki kearifannya masing-masing. Ini menjadikan Indonesia sebagai Negara majemuk *par excellence* di dunia. Dengan demikian, fungsi perpolisian di Indonesia juga sangat perlu dijalankan dengan memperhatikan dan mendasarkan pada konfigurasi sosial yang demikian itu.

Kita menghendaki, agar Polri menjadi kekuatan yang modern di tengah-tengah dunia abad kedua puluh satu ini. Justru karena memiliki kekayaan sejarah demikian itu, maka kita tidak dapat membangun dan memoderniser Polri mulai dari nol. Saya menyarankan agar pola pembangunan Polri tidak mengikuti *"development imposed from outside"* melainkan suatu *"development from within"*.

Perkembangan yang dipaksakan dari luar hanya akan menjadikan polisi-polisi Indonesia asing bagi rakyatnya sendiri.\*\*\*